



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2014-2015.
Masa Persidangan ke-	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: <b>Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).</b>
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 19 Januari 2015.</b>
Pukul	: <b>14.50 – 16.30 WIB.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ir. H.M. Ridwan Hisyam/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Agus Salim, S.H/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan terkait dengan posisi guru; 2. Pembahasan penyelesaian sertifikasi dan kualifikasi guru berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 3. Lain-lain.
Hadir	: 38 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir	: Ketua Umum PGRI beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.50 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ir. H.M. Ridwan Hisyam, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

**II. CATATAN RAPAT.**

Komisi X DPR RI memberikan apresiasi paparan dan masukan dari PGRI mengenai sertifikasi dan kualifikasi guru sebagai berikut:

1. berdasarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 dan Pasal 82 mengatur bahwa guru merupakan jabatan profesi sehingga guru dituntut memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi; Namun demikian pada implementasi ditemukan banyak permasalahan keguruan, yang dapat dipetakan menjadi 2 (dua) masalah utama yaitu: (i) kualitas (kinerja) guru; dan (ii) manajemen pengelolaan guru.
2. untuk mendapatkan guru yang memiliki kualifikasi yang mampu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, diperlukan langkah strategis yaitu:
  - a. Fokus perbaikan kualitas guru harus mencakup kompetensi/kecakapan pedagogik dan profesional;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap proses penjaminan mutu dan pembinaan terhadap LPTK swasta secara proporsional sebagai konsekuensi dari penerbitan ijin;

- c. mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan program S1 untuk guru yang masih tersisa 48%.
  - d. Perlu disusun sistem kesetaraan pangkat dan jabatan guru (*inpassing*) pada penetapan/pengugasan guru.
3. Untuk menjawab permasalahan manajemen pengelolaan guru, perlu kebijakan yang bersifat sentralisasi dan disusun sebuah *grand design* pembinaan dan pengembangan guru yang mencakup:
    - a. rekrutmen guru yang bebas KKN;
    - b. perencanaan kebutuhan guru, dan pengangkatan guru;
    - c. distribusi dan mutasi guru;
    - d. tupoksi organisasi profesi guru sesuai dengan ketentuan UU Guru dan Dosen Pasal 41 dan Pasal 42; dan
    - e. pelatihan guru yang berkualitas.
  4. Seluruh masukan dan usulan PGRI merupakan bahan yang tidak terpisahkan untuk disertakan dalam pengambilan kebijakan pada rapat dengan Pemerintah.

III. **PENUTUP.**

Rapat ditutup pada pukul **13.45 WIB.**

Jakarta, 19 Januari 2015  
PIMPINAN KOMISI X DPR RI  
WAKIL KETUA,



IR. H.M. RIDWAN HISYAM